

KONFLIK HUKUM HAK BERPARTAI POLITIK

**(Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi)**

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum



OLEH:

AIDA DEWI

NIM: R 100 110 007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

NOTA PEMBIMBING I

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., MHum
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal: Tesis Saudara Aida Dewi

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara:

Nama : Aida Dewi
NIM : R 100 110 007
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Konflik Hukum Hak Berpartai Politik
(Studi Pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 Tahun 2012
Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Konstitusi)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu' alaikum wr. Wb.

Surakarta, 12 September 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., MHum.

NOTA PEMBIMBING II

Prof. Dr. Harun, SH., MHum
Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas
Hal: Tesis Saudara Aida Dewi

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara:

Nama : Aida Dewi
NIM : R 100 110 007
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul : Konflik Hukum Hak Berpartai Politik
(Studi Pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 Tahun 2012
Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
terhadap Konstitusi)

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamu' alaikum wr. Wb.

Surakarta, 12 September 2013
Pembimbing II,



Prof. Dr. Harun, SH., MHum

TESIS BERJUDUL

KONFLIK HUKUM HAK BERPARTAI POLITIK (Studi Pasal 18 Ayat (1) Huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh

AIDA DEWI

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 12 September 2013


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping I


Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping II

Anggota Dewan Penguji Lain


Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Surakarta, 27 September 2013



Universitas Muhammadiyah Surakarta
Program Pascasarjana
Direktur,

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : AIDA DEWI

NIM : R 100 110 007

Program studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

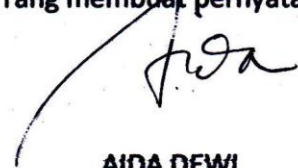
Judul : Konflik Hukum Hak Berpartai Politik

(Studi Pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 Tahun 2012
Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Terhadap Konstitusi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 12 September 2013

Yang membuat pernyataan,



AIDA DEWI

MOTTO

FIAT JUSTITIA RUAT COELUM

“Tegakkan kebenaran walau langit akan runtuh”

PERSEMBAHAN

Tesis Ini aku persembahkan untuk:

1. Almamaterku

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. Bapak Ibuku tercinta (Ibu Saroch, SPd dan Bpk Sawab, BA)

3. Suamiku Tersayang (Moelyono, SE) dan anak-anakku tersayang (Rico Agung Satria Atmaja, Adinda Paramitha Putri Permatasari, Adiyatama Yudha Millenio, Aifa Zaskia Mutiara Putri)

4. Sahabat- sahabatku: Rizka, Muh. Syafik, Sofyan Hadi, Surisman, Wafdah Vivit, Sony Aji.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘alamiin, rasa sur penulis panjatkan kehadiran Alhamdulillah hi’ robbil alamin, puji syukur saya panjatkan kehadiran Alloh SWT atas karunia kesehatan, kemudahan sehingga selesainya tesis ini dengan judul” *Konflik Hukum Hak Berpartai Politik (Studi Pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Konstitusi).*”Sebuah tulisan tentang terjadinya pertentangan antara isi dari pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sebagai anggota partai politik sedangkan isi pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk berserikat dan berkumpul serta berpendapat.

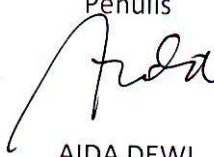
Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan guna mencapai derajat S2 dalam program Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menerima kebaikan budi, banyak mendapat bantuan dan bimbingan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta

2. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., MHum, Pembimbing Utama penulisan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Harun, SH., MHum, selaku pembimbing II penulisan tesis ini.
4. Bapak-bapak Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengajar penulis sehingga membekali materi sebagai bahan penulisan tesis ini.
5. Bapak Ibu Pimpinan beserta staf Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian.
6. Rekan sejawat dan semua pihak yang telah mendorong dan membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari keterbatasan dalam penulisan ini sehingga jauh dari sempurna namun demikian penulis berharap agar tesis ini mempunyai kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Surakarta, 12 September 2013

Penulis

AIDA DEWI

ABSTRACT

Name : AIDA DEWI

Title : CONFLICT LEGAL RIGHTS PARTISAN POLITICS

**(Studi of article 18 paragraph (1) letter n Law. 13 Year 2012 About
the Speciality of Yogyakarta Againts The Constitution)**

There has been a deviation on the content of the Law No. 13 of 2012 on The speciality of Yogyakarta to the Constitution. To determine the deviation is in Article 18 paragraph (1) letter n Law. 13 in 2012 to Article 28E (3) of the 1945 Constitution. Section 28E (3) of the 1945 Constitution states that "Everyone has the right to freedom of association, assembly, opinion and expression" and the contents of Article 18 paragraph (1) letter n Law. 13 of 2012 on the Privileges Yogyakarta Special Region reads "that the candidates for Governor and Deputy Governor are citizens of the Republic of Indonesia which shall not qualify as a member of a political party." Ngayogyakarta Sultanate and the Duchy Pakualaman has had a territory, the government and the population before the birth of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. Yogyakarta has been special since its establishment Homeland and not because of the Labor Law. Conclusion that the substance of the content of the Law. 13 in 2012, namely in Article 18 paragraph (1) letter n along with the accessories that paragraph (2) letter m contrary to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 as a Constitution of the Republic of Indonesia as the highest form of legislation which is the basis and source of all legislation under, contrary to the basic principles of the establishment of laws and contrary to the substance of the legislation of the Republic of Indonesia.

Key Words: Labor Law, Privileges

ABSTRAK

Nama : AIDA DEWI

Judul : KONFLIK HUKUM HAK BERPARTAI POLITIK

(Studi pada Pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 Tahun 2012

Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap

Konstitusi).

Telah terjadi penyimpangan pada isi Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Konstitusi. Untuk mengetahui penyimpangan tersebut yaitu pada pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 terhadap Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 berbunyi” *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” dan isi pasal 18 ayat (1) huruf n UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berbunyi” bahwa *calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat bukan sebagai anggota partai politik.*”Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yogyakarta telah istimewa sejak awal berdiri NKRI dan bukan karena UUK ini. Kesimpulan, bahwa isi materi muatan dari UU No. 13 tahun 2012 yaitu pada Pasal 18 ayat (1) huruf n beserta kelengkapannya yaitu ayat (2) huruf m bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sebagai sebuah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bentuk peraturan perundangan yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan di bawahnya, bertentangan dengan asas-asas dasar pembentukan peraturan perundangan serta bertentangan dengan materi muatan peraturan perundangan Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: UUK, Keistimewaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	13
B. Latar Belakang Keistimewaan DIY.....	17

C. KOMPARASI UU No. 13 tahun 2012 dengan UU No. 32 tahun 2004...	20
--	----

BAB III GAMBARAN UMUM HAK BERPARTAI POLITIK

A. Pelaksanaan berpartai politik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.....	45
B. Potensi Konflik Hukum antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 terhadap Konstitusi.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan Jogjakarta di tetapkan sebagai Daerah Istimewa	51
B. Komparasi UU No. 13 Tahun 2012 dengan UU No. 32 tahun 2004 dalam Hak Berpartai Politik	57
C. Dalam Pasal 18 ayat 1 huruf n UU No. 13 tahun 2012 bertentangan dengan Konstitusi	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA